

**PENGARUH UPAH MINIMUM DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN  
TENAGA KERJA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2015-2023**

**Ilham Nurwahyudi<sup>1</sup>, Akung Daeng<sup>2</sup>, Adhitya Bagus Singandaru<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mataram

Corresponding Author: [shogunspmiom3@gmail.com](mailto:shogunspmiom3@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015-2023. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, studi kepustakaan, dan sumber dari BPS Provinsi NTB, BPS Kota Mataram, serta NTB Satu Data. Analisis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan regresi Data Panel menggunakan Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2023, sedangkan Investasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2023. Secara simultan, variabel upah minimum dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2023. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kebijakan yang mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di NTB.

**Kata Kunci:** Upah Minimum, Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja

**1. PENDAHULUAN**

Menurut Kuncoro (2002) sebagaimana dikutip oleh Teneh *et al* (2019) Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dari tahun 2021 hingga 2023 jumlah angkatan kerja di Indonesia selalu meningkat. Hal ini menjadi masalah utama yang dihadapi, bahwa pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja yang sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

Menurut BPS Nusa Tenggara Barat,(2024), angkatan kerja di NTB pada 2023 mencapai 2.976.230 orang, meningkat dibandingkan 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya tambahan pasokan tenaga kerja, namun tidak selalu diimbangi dengan permintaan yang cukup. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat pengangguran di NTB antara 2019-2023, yaitu 85,50 ribu orang (2019), 113,43 ribu orang (2020), 82,50 ribu orang (2021), 80,83 ribu orang (2022), dan 83,24 ribu orang (2023). Pengangguran sempat menurun pada 2021 dan 2022, namun kembali naik pada 2023. Dalam penelitian sebelumnya rata rata mengambil 1-5 tahun terakhir dalam penelitian yang dilakukan. Jadi, peneliti dalam penelitian ini rentang waktu 9 tahun terakhir di kabupaten/kota Provinsi NTB sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya.

**Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023**

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lombok Barat	354.481	342.531	367.379	377.544	394.140
2	Lombok Tengah	496.536	518.563	533.762	524.080	602.080
3	Lombok Timur	566.546	582.812	610.870	623.662	689.250
4	Sumbawa	223.391	230.507	227.632	252.112	275.380
5	Dompu	115.446	121.614	119.873	128.644	126.920
6	Bima	255.004	248.447	253.817	261.761	293.490
7	Sumbawa Barat	71.742	74.262	78.069	86.805	73.970
8	Lombok Utara	116.589	117.484	120.407	128.994	139.630
9	Kota Mataram	231.572	244.766	245.775	240.373	210.330
10	Kota Bima	90.447	94.970	99.811	94.370	87.790

Sumber : (BPS Nusa Tenggara Barat, 2024)

Salah satu variabel yang bisa dibidang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu Upah minimum. Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, penetapan upah minimum yang terlalu tinggi juga dapat menjadi beban bagi pengusaha yang pada gilirannya dapat menghambat penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, upah minimum yang terlalu rendah mungkin tidak cukup untuk mendorong peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, yang juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja (Khalimatus *et al.*, 2009).

**Tabel 2 Data Upah Minimum Provinsi Menurut Kabupaten/Kota (Rp.) di NTB Tahun 2019-2023**

No.	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Mataram	2.013.165	2.184.485	2.184.485	2.416.953	2.598.079
2	Lombok Barat	2.013.110	2.184.425	2.184.425	2.207.212	2.598.079
3	Lombok Tengah	2.021.000	2.192.987	2.192.987	2.207.212	2.367.676
4	Lombok Timur	2.012.900	2.184.197	2.184.197	2.207.212	2.372.532
5	Lombok Utara	2.014.610	2.186.053	2.186.053	2.207.212	2.361.231
6	Sumbawa Barat	2.100.000	2.278.710	2.278.710	2.316.279	2.474.712
7	Sumbawa	2.028.950	2.201.613	2.201.613	2.227.172	2.389.506
8	Bima	2.055.000	2.229.880	2.229.880	2.243.371	2.369.310
9	Dompu	2.016.000	2.187.562	2.187.562	2.207.212	2.400.833
10	Kota Bima	2.050.000	2.225.000	2.225.000	2.265.367	2.425.030

Sumber : (BPS Nusa Tenggara Barat, 2019)&(NTB Satu Data, 2023)

\*\*Data Upah Minimum Tahun 2020 dan 2021 sama dikarenakan ada peristiwa Covid-1

Selain itu, Investasi juga memiliki peran yang sangat krusial dalam penyerapan tenaga kerja dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru di suatu wilayah. Menurut Dumairy (1996) sebagaimana dikutip oleh ( Fadliyanti *et al.*, 2021). Investasi terdiri dari 2 kategori yaitu PMDN dan PMA. Investasi yang berasal dari dalam negeri disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). sementara investasi dari luar negeri disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Sukirno (1997) yang dikutip oleh (Iksan *et al.*, 2020), investasi adalah pengeluaran yang digunakan untuk penanaman modal dan pembelian perlengkapan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian, seperti investasi dalam bentuk mesin dan teknologi yang mendukung proses kerja.

**Tabel 3 Data Realisasi Investasi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023**

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
		Dalam Rupiah (Rp)				
1	Lombok Barat	2.205.164.831.957	1.915.815.946.577	1.745.061.441.446	272.049.083.758	953.469.183.959
2	Lombok Tengah	1.796.765.986.738	569.487.579.087	3.703.570.497.111	702.887.342.259	3.205.060.920.406
3	Lombok Timur	380.961.295.695	2.634.288.192.494	1.452.999.546.206	273.344.710.578	720.077.584.323
4	Sumbawa	604.335.496.942	303.451.134.144	232.006.172.868	3.282.894.375.877	1.809.779.719.159
5	Dompu	452.192.778.872	2.091.684.706.472	1.136.596.444.511	95.111.199.075	1.975.759.758.291
6	Bima	25.700.000.000	105.097.346.308	154.584.488.049	39.584.557.629	256.346.957.278
7	Sumbawa Barat	3.005.544.187.269	3.077.096.763.232	3.209.379.687.445	14.619.860.119.515	28.583.339.640.446
8	Lombok Utara	558.121.890.380	218.075.960.411	1.383.348.292.144	538.137.321.385	1.109.746.744.025
9	Kota Mataram	850.222.250.656	668.162.341.445	806.485.518.611	1.601.470.669.012	1.198.927.211.702
10	Kota Bima	167.914.197.701	17.454.990.236	101.752.116.939	181.328.494.228	84.420.792.195

Sumber : (NTB Satu Data, 2024)

Penyerapan tenaga kerja yang optimal menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi di NTB, namun meskipun upah minimum ditetapkan dan investasi terus meningkat, pengangguran di

NTB masih tinggi. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga berpotensi mengurangi tenaga kerja jika perusahaan kesulitan menyesuaikan biaya operasional. Investasi yang masuk diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, namun pengangguran tetap tinggi, menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di NTB tahun 2015-2023 diperlukan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menentukan hubungan antara variabel independen dan dependen. Penelitian ini berfokus pada Kabupaten/Kota Provinsi NTB, yang mencakup periode 9 tahun dari 2015 hingga 2023. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), NTB Satu Data, dan literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dari publikasi BPS, serta sumber sekunder seperti makalah ilmiah, buku, dan artikel. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu (*time series*) selama 9 tahun dan lokasi (*cross section*) di 10 Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi NTB dan Investasi Kabupaten/Kota Provinsi NTB - dan variabel dependen, yaitu Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Analisis dilakukan dengan menggunakan Regresi Data Panel, dengan menggunakan model *GLS*. Selain itu, uji statistik seperti koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji-t, dan uji F digunakan untuk mengevaluasi signifikansi variabel-variabel dalam model.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Spesifikasi Model

**Gambar. 1 Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	424.499804	(9,75)	0.0000
Cross-section Chi-square	343.657722	9	0.0000

Sumber : Pengolahan Data Eviews 12

Hasil uji chow menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 ( $0.0000 < 0.05$ ) Artinya, model yang terpilih adalah FEM dibandingkan CEM.

**Gambar. 2 Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.406182	2	0.105

Sumber : Pengolahan Data Eviews 12

Hasil uji hausman menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 ( $0.1105 > 0.05$ ). Artinya, model yang terpilih adalah REM dibandingkan FEM.

**Gambar. 3 Uji LM**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	300.6552 (0.0000)	4.114783 (0.0425)	304.7700 (0.0000)
Honda	17.33941 (0.0000)	-2.028493 (0.9787)	10.82645 (0.0000)
King-Wu	17.33941 (0.0000)	-2.028493 (0.9787)	10.42918 (0.0000)
Standardized Honda	18.89716 (0.0000)	-1.753900 (0.9603)	9.233296 (0.0000)
Standardized King-Wu	18.89716 (0.0000)	-1.753900 (0.9603)	8.793664 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	300.6552 (0.0000)

Sumber : Pengolahan Data Eviews 12

Hasil uji LM yang dilakukan karena pengujian ini bertujuan memilih antara model CEM atau REM dan yang terpilih adalah REM.

**Gambar. 4 Model REM**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 12/19/24 Time: 11:10  
Sample: 2015 2023  
Periods included: 9  
Cross-sections included: 10  
Total panel (unbalanced) observations: 87  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	103354.1	51547.24	2.005037	0.0482
X1	0.073795	0.008809	8.377018	0.0000
X2	-7.23E-10	1.03E-09	-0.703852	0.4835

  

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		153401.3	0.9755
Idiosyncratic random		24333.52	0.0245

  

Weighted Statistics			
R-squared	0.454054	Mean dependent var	13516.26
Adjusted R-squared	0.441056	S.D. dependent var	32969.16
S.E. of regression	24689.58	Sum squared resid	5.12E+10
F-statistic	34.93074	Durbin-Watson stat	0.809464
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Pengolahan Data Eviews 12

**Pembahasan:**

- a. Model regresi data panel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model Random Effect Model dengan pendekatan Generalized Least Square (GLS). Menurut Gujarati dan Porter (2009), yang dikutip oleh (Kosmaryati et al., 2019), dalam metode estimasi

model panel, model pengaruh acak (random effect) menggunakan metode generalized least square (GLS), sementara model pengaruh gabungan (common effect) dan model pengaruh tetap (fixed effect) menggunakan metode ordinary least square (OLS). Salah satu keuntungan utama dari metode GLS adalah tidak memerlukan pemenuhan asumsi klasik. Oleh karena itu, apabila regresi menggunakan model random effect, uji asumsi klasik tidak diperlukan. Sebaliknya, jika model yang digunakan adalah common effect atau fixed effect, uji asumsi klasik harus dilakukan.

- b. Hasil estimasi secara parsial diperoleh upah minimum (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2023. Variabel kedua, investasi (X2) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2023.
- c. Hasil estimasi secara simultan diperoleh upah minimum (X1) dan investasi (X2) secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y).
- d. Dari hasil estimasi diperoleh nilai adjusted R<sup>2</sup> 0.441056 atau 44,1056% artinya variabel independen yang terdiri dari Upah minimum dan Investasi mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 44,1056%, sedangkan sisanya yaitu 55,8944% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah: (1) Hasil estimasi parsial menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2023; (2) Investasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2023; (2) Secara simultan, upah minimum dan investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja; dan (3) Nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,441056 atau 44,1056% mengindikasikan bahwa variabel independen, yaitu upah minimum dan investasi, dapat menjelaskan 44,1056% penyerapan tenaga kerja, sementara sisanya 55,8944% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk Penelitian selanjutnya, jika ingin menggunakan variabel Investasi diharapkan memilih antara Investasi Padat Modal atau Padat Karya; (2) Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengaruh upah minimum dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja, Penelitian berikutnya disarankan untuk memasukkan lebih banyak variabel yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja seperti Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan kebijakan pemerintah daerah terkait pelatihan keterampilan; dan (3) Penelitian ini terbatas pada data investasi tahun 2015-

2023. Hal ini dikarenakan banyak data Investasi PMDN yang kosong pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019, serta data Investasi PMA yang kosong ada pada tahun 2015, 2016, dan 2018.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BPS Nusa Tenggara Barat. (2019). *PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM ANGKA NUSA TENGGARA BARAT PROVINCE IN FIGURES*.
- BPS Nusa Tenggara Barat. (2024). *Keadaan Angkatan Kerja 2019 - 2023*. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, 19. <https://ntb.bps.go.id/id/publication/2024/04/30/3673bf234ff029e11fc8a204/keadaan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-barat-2023.html>
- Iksan, S. A. N., Arifin, Z., & Suliswanto, M. S. W. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(1), 42–55. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i1.9482>
- Khalimatus, S. S., Lorentino, T. L., & Jalunggono, G. (2009). *DINAMIC : Directory Journal of Economic Volume 2 Nomor 1. the Influence of Factor That Cause Poverty in Kebumen*, 3, 236–245.
- Luluk Fadliyanti, Surtika Yanti, & Abdul Manan. (2021). Pengaruh Belanja Modal, Investasi PMDN Dan Investasi PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB. *Journal of Economics and Business*, 7(1), 18–39. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.67>
- NTB Satu Data. (2023). *UPAH MINIMUM 2018-2023*. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/9cfd6ff2-5d7f-44f3-b71b-18850c7445f6/show>
- NTB Satu Data. (2024). *Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Kabupaten Kota. NTB Satu Data*. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/perkembangan-realisasi-investasi-pma-menurut-kabupatenkota-di-provinsi-ntb/resource/385b8ad0#%7Bview-graph:%7BgraphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffset:%7B%7D,bindEvents:%7B%7D%7D%7D%7D,graphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffse>
- Teneh, E. G., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2019). Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 72–83.